



2025



STANDAR KERJASAMA

**Universitas Muhammadiyah
Pekajangan Pekalongan**



BADAN PEMBINA HARIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN
UMPP

SK. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 660/KEP/I.0/D/2023

Jalan Raya Pekajangan No. 1A Kab. Pekalongan Telp. (0285) 7832294 website: www.umpp.ac.id email: admin@umpp.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
KETUA BADAN PEMBINA HARIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN
Nomor: 006/BPH/KEP/B/2025

Tentang :
PENETAPAN STANDAR MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan:

- Menimbang** : a. bahwa sebagai upaya pengendalian dan peningkatan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan sangat penting dilakukan di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan diperlukan adanya standar mutu
- b. bahwa untuk mencapai hal tersebut, diperlukan adanya aturan dasar untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
- c. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan dari Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan tentang Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
- Mengingat** : 1. Aturan Dasar (AD) Muhammadiyah
2. Aturan Rumah Tangga (ART) Muhammadiyah
3. Statuta Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
- Berdasarkan** : 1. Usulan Permohonan SK Manual Mutu Universitas UMPP No. 151/LPM-01/UMPP/XII/2025 tanggal 8 Desember 2025
2. Rapat Koordinasi Badan Pembina Harian tanggal 9 Desember 2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PEMBINA HARIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN TENTANG STANDAR MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN
- Pertama** : Mengesahkan Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Demikian Surat Keputusan ini disampaikan dapat digunakan dengan sebaik – baiknya.

Ditetapkan di : Pekajangan
Pada tanggal : 19 Jumadil Akhir 1447 H
10 Desember 2025 M

Ketua

Dr. H. Imam Suraji, M.Ag.

Badan Pembina Harian (BPH)
Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan



Sekretaris

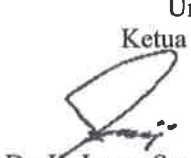
H. Abdul Shomad, SE

*Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah
Pekalongan Pekalongan
Nomor: 006/BPH/KEP/B/2025 tanggal 10 Desember 2025 M*

No	Standar	Nama Standar	Nomor Standar
1	Standar Pendidikan	Standar Luaran Pendidikan	UMPP/BPH/STD/03/001/R4
2		Standar Proses Pendidikan	UMPP/BPH/STD/03/002/R4
3		Standar Masukan Pendidikan	UMPP/BPH/STD/03/003/R4
4	Standar Penelitian	Standar Luaran Penelitian	UMPP/BPH/STD/03/004/R4
5		Standar Proses Penelitian	UMPP/BPH/STD/03/005/R4
6		Standar Masukan Penelitian	UMPP/BPH/STD/03/006/R4
7	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	UMPP/BPH/STD/03/007/R4
8		Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	UMPP/BPH/STD/03/008/R4
9		Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat	UMPP/BPH/STD/03/009/R4
10	Standar Tambahan Perguruan Tinggi	Standar Jati diri	UMPP/BPH/STD/03/010/R4
11		Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah	UMPP/BPH/STD/03/011/R4
12		Standar Tata pamong, Tata kelola dan Penjaminan Mutu	UMPP/BPH/STD/03/012/R4
13		Standar Sumber Daya Manusia	UMPP/BPH/STD/03/013/R4
14		Standar Kerjasama	UMPP/BPH/STD/03/014/R4
15		Standar Kemahasiswaan dan Alumni	UMPP/BPH/STD/03/015/R4
16		Standar Keuangan	UMPP/BPH/STD/03/016/R4
17		Standar Sistem Informasi	UMPP/BPH/STD/03/017/R4
18		Standar Kesejahteraan	UMPP/BPH/STD/03/018/R4
19		Standar Sarana dan Prasarana	UMPP/BPH/STD/03/019/R4
20		Standar Humas dan Kesekretariatan	UMPP/BPH/STD/03/020/R4

Badan Pembina Harian (BPH)
Universitas Muhammadiyah Pekalongan Pekalongan

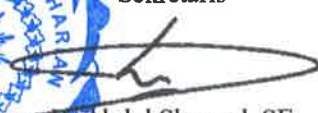
Ketua



Dr. H. Imam Suraji, M.Ag.



Sekretaris



H. Abdul Shomad, SE

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	Kode/No	UMPP/BPH/STD/03/014/R4
		Tanggal	14 Februari 2025/ 15 Sya'ban 1446 H
	STANDAR KERJASAMA	Revisi	4

STANDAR KERJASAMA

NO	PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Perumusan	Aida Rusmariana, S.Kep.Ns., MAN	Kepala LPBK		25 November 2025/ 4 Jumadil Akhir 1447 H
2	Pemeriksaan	Bd. Nur Chabibah, S.Keb., MPH	Kepala LPM		4 Desemeber 2025/ 13 Jumadil Akhir 1447 H
3	Persetujuan	Dr. Imam Suradji, M.Ag	Ketua BPH		8 Desember 2025/ 17 Jumadil Akhir 1447 H
4	Pertimbangan	Dr. Nur Izzah., SKp., MKes	Senat		8 Desember 2025/ 17 Jumadil Akhir 1447 H
5	Penetapan	Dr. Nur Izzah., SKp., MKes	Rektor		9 Desember 2025/ 18 Jumadil Akhir 1447 H
6	Pengendalian	Bdn. Wahyu Ersila, SST., MPH	Sekretaris LPM		9 Desember 2025/ 18 Jumadil Akhir 1447 H



CATATAN REVISI		
No.	Tanggal	Revisi/Perubahan
1	15 September 2020 (R1)	Penyesuain dengan SPMI UMPP dengan SPMI Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisiyah
2	30 September 2021 (R2)	Penambahan substansial dengan delapan (8) Indikator kinerja utama (IKU) Kementerian Pendidikan tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia
3	14 Februari 2025 (R3)	1. Penyesuain dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 tahun 2023 2. Penyesuaian Intrumen akreditasi delapan (8) kriteria Badan Akreditasi Nasional Perguruan tinggi dan Lembaga akreditasi Mandiri
4	9 Desember 2025 (R4)	1. Penyesuaian dengan Penyesuain dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 tahun 2025 2. Penyesuaian dengan Indikator Kinerja Utama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Berdampak Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Tinggi Tahun 2025



1. Daftar Istilah

- a. **Kerja Sama UMPP** merupakan bentuk mitra sejajar UMPP dengan pihak lain dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan sumber daya dalam kegiatan Al Islam dan Kemuhammadiyah, pendidikan dan pengajaran, penelitian, maupun pengabdian pada masyarakat, Caturdarma UMPP dalam jangka waktu tertentu.
- b. **Ruang lingkup kerja sama** mencakup kerja sama dengan persyarikatan Muhammadiyah, kerja sama antar PTMA, kerja sama dengan pemerintah dalam negeri, kerja sama dengan pihak swasta dalam negeri, kerja sama dengan pemerintah tingkat internasional, kerja samadengan pihak swasta tingkat internasional.
- c. **Ruang lingkup kerja sama** dengan mitra dalam negeri mencakup lembaga resmi yang memiliki reputasi baik, terdiri atas lembaga pendidikan, ekonomi, kesehatan, teknologi, industri, dan lembaga lain yang bergerak di bidang sosial dan humaniora.
- d. **Kerja sama bidang Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK)** mencakup kerja sama dalam bidang pendidikan dan pengajaran AIK, penelitian AIK, dan pengabdian kepada masyarakat AIK.
- e. **Kerja sama bidang pendidikan dan pengajaran** mencakup pengembangan sumber daya bidang pengembangan akademik seperti pengembangan kurikulum, studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen/dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pengadaan/pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran, pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran.
- f. **Kerja sama bidang Penelitian** mencakup pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat, seperti *sharing* penelitian, *sharing* dana penelitian, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama.
- g. **Kerja sama bidang pengabdian kepada masyarakat** mencakup implementasi keilmuan yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat seperti *sharing* kegiatan pengabdian kepada masyarakat, *sharing* dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama, publikasi dan pemanfaatan produk bersama-sama.
- h. **Syarat kerja sama**, pihak mitra tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara maupun Persyarikatan Muhammadiyah, tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan, bertujuan untuk meningkatkan kinerja semua pihak, lembaga resmi bukan partai politik atau afiliasi partai politik tertentu.
- i. **Masa kerjas ama** ditentukan berdasarkan kesepakatan, pelaksanaannya diketahui oleh semua pihak, dan ada monitoring dan evaluasi yang efektif.
- j. **Kriteria kemitraan dan mitra** adalah sebagai berikut:
 - Kriteria Kemitraan
Perjanjian kerja sama yang setidaknya menyatakan komitmen mitra dalam penyerapan lulusan. Dapat diperkuat dengan bentuk kerja sama lainnya seperti:
 - 1) Untuk Bidang Akademik: a) pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (output) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); dan b) menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh. Serta dapat



- melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian.
- 2) Untuk Bidang Vokasi: a) pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (output) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); b) menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh; c) menyediakan kesempatan kerja; dan d) mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamupraktisi. Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian dan/ atau memberikan pelatihan bagi dosen dan instruktur.
 - 3) Untuk Bidang Seni Budaya: a) pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil loutput) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); dan b) menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh. Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian.
- Kriteria mitra:
- 1) perusahaan multinasional;
 - 2) perusahaan nasional berstandar tinggi;
 - 3) perusahaan teknologi global;
 - 4) perusahaan rintisan (*startup company*) teknologi;
 - 5) organisasi nirlaba kelas dunia;
 - 6) institusi/ organisasi multilateral;
 - 7) perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS 100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject)
 - 8) perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan;
 - 9) instansi pemerintah, BUMN, dan/atau BUMD;
 - 10) rumah sakit;
 - 11) UMKM; atau
 - 12) lembaga riset pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional.

k. **Formula:**
$$\frac{n}{100(x+y)} \times$$

n = jumlah program studi S1 dan D3 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.

x=jumlah program studi S1. y = jumlah program studi D3

2. Rasionale

- a. Kerja sama yang dilakukan UMPP merupakan langkah nyata perwujudan darma perguruan tinggi dalam mencari solusi terhadap suatu permasalahan, kesenjangan atau langkah nyata dalam upaya peningkatan mutu UMPP, lembaga, unit kegiatan baik di pemerintahan maupun masyarakat/ industri. Kerja sama perguruan tinggi dilaksanakan dalam rangka peningkatan relevansi kegiatan perguruan tinggi terhadap kebutuhan masyarakat serta pembentukan masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge based society*).
- b. Berbagai macam ruang lingkup kerja sama dikenal di UMPP, yaitu kerja sama dengan persyarikatan Muhammadiyah, kerja sama antar PTMA, kerja sama dengan pemerintah dalam negeri, kerja sama dengan pihak swasta dalam negeri, kerja sama dengan pemerintah tingkat internasional, kerja sama dengan pihak swasta tingkat internasional.
- c. Kerja sama lokal dapat terwujud dalam bentuk kerja sama antara UMPP dengan persyarikatan Muhammadiyah, amal usaha Muhammadiyah, antar UMPP dan



- perguruan tinggi atau lembaga lain dalam negeri.
- d. Kerja sama dalam negeri dapat terwujud dalam bentuk kerja sama antara UMPP dengan pihak lembaga pemerintah atau swasta yang bertaraf nasional.
 - e. Kerja sama luar negeri dapat terwujud kerja sama antara UMPP dengan lembaga resmi di luar negeri yang memiliki reputasi internasional.
 - f. Bidang kerja sama UMPP dengan pihak lain mencakup bidang Tridharma atau Caturdharma PTM dengan syarat tertentu, dan jangka waktu tertentu.
 - g. Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan (UMPP) berjalan dengan efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama serta dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi dan peran bagi semua program studi dan fakultas di UMPP, maka diperlukan kerja sama dengan berbagai pihak baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk pengembangan caturdharma perguruan tinggi. Oleh karena itu UMPP menyusun Standar kerja sama yang merupakan pengembangan dari Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 tahun 2025 serta Indikator Kinerja Utama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Berdampak Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Tinggi Tahun 2025

3. Isi Standar

- a. Rektor UMPP menyusun dokumen yang lengkap tentang kebijakan, perencanaan pengembangan jejaring kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan strategi institusi.
- b. Kepala LPBK UMPP menyusun dokumen formal yang lengkap tentang prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerja sama internal Persyarikatan Muhammadiyah termasuk antar PT Muhammadiyah dan Aisyiyah.
- c. Kepala LPBK UMPP menyusun dokumen formal yang lengkap tentang prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerja sama lembaga formal dalam negeri.
- d. Kepala LPBK UMPP menyusun dokumen formal yang lengkap tentang prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerja sama lembaga formal luar negeri.
- e. Kepala LPBK UMPP menyusun SOP tentang kerja sama yang dilaksanakan secara efektif dan efisien dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi kepuasan.
- f. Kepala LPBK memastikan lembaga yang dipimpinnya memiliki data yang lengkap tentang jumlah, lingkup, relevansi, dan kemanfaatan kerja sama.
- g. Kepala LPBK UMPP melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerja sama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan yang digunakan untuk menjamin ketercapaian VMTS.
- h. Kepala LPBK UMPP bertanggungjawab dalam hal UMPP memiliki bukti yang sah tentang kerja sama Caturdharma yang dilengkapi dengan hasil analisis data terkait manfaat kerja sama bagi UMPP.
- i. Kepala LPBK UMPP bertanggungjawab dalam hal UMPP memiliki bukti kerja sama bidang Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) mencakup kerja sama



dalam bidang pendidikan dan pengajaran AIK, penelitian AIK, dan pengabdian kepada masyarakat AIK.

- j. Kepala LPBK UMPP bertanggungjawab menjalin kerja sama bidang pendidikan dan pengajaran mencakup pengembangan sumber daya bidang pengembangan akademik seperti pengembangan kurikulum, studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen/dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pengadaan/pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran, dan pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran.
- k. Kepala LPBK UMPP bertanggungjawab menjalin kerja sama bidang penelitian mencakup pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat, seperti *sharing* penelitian, *sharing* dana penelitian, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama.
- l. Kepala LPBK UMPP bertanggungjawab menjalin kerja sama bidang pengabdian kepada masyarakat mencakup implementasi keilmuan yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat seperti *sharing* kegiatan pengabdian kepada masyarakat, *sharing* dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama, publikasi dan pemanfaatan produk bersama-sama.
- m. Kepala LPBK UMPP bertanggungjawab menyusun dokumen asas kerja sama UMPP.
- n. Kepala LPBK UMPP memastikan bahwa pihak yang terlibat dalam kerja sama taat pada syarat kerja sama, yaitu pihak mitra tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara maupun Persyarikatan Muhammadiyah, tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan, bertujuan untuk meningkatkan kinerja semua pihak, lembaga resmi bukan partai politik atau afiliasi partai politik tertentu.
- o. Kepala LPBK UMPP bersama unit terkait wajib menyusun dan melaksanakan kegiatan tindak lanjut kerja sama dengan mitra.
- p. Kepala LPBK UMPP wajib memastikan terdapat dokumen pengakuan kerja sama dibidang pendidikan dan pengajaran.
- q. Kepala LPBK UMPP wajib memastikan terdapat dokumen pengakuan kerja sama dibidang penelitian.
- r. Kepala LPBK UMPP wajib memastikan terdapat dokumen pengakuan kerja sama dibidang pengabdian kepada masyarakat.
- s. Kepala LPBK UMPP wajib menyusun instrumen kepuasan mitra yang telah diuji validitas dan reliabilitas.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan standar kerja sama dan SOP kepada para pemangku kepentingan, pejabat struktural, para dosen, tenaga kependidikan, dan paramahasiswa secara periodik.
- b. Membuat SOP dan rencana kerja sama dengan berbagai pihak mitra.
- c. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan audit internal secara berkala terhadap



implementasi standar kerja sama.

- d. Melaksanakan audit internal dan eksternal terhadap implementasi standar kerja sama.
- e. Melakukan survei kepuasan mitra dan melakukan analisa hasil survei dan rencana tindak lanjut atas hasil survei.



5. Indikator Pencapaian

a. Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
1.	Dokumen kebijakan kerja sama dan kemitraan yang dimiliki oleh UMPP.	100% memiliki kebijakan dokumen kerja sama dan kemitraan	Risiko: Tidak tersedianya atau tidak lengkapnya dokumen kebijakan kerja sama dan kemitraan Akar Penyebab: 1. Belum ada regulasi internal yang lengkap 2. Kurangnya koordinasi antar unit terkait 3. Proses penyusunan dokumen belum terstandar 4. Belum ada monitoring berkala terkait legalitas & pembaruan dokumen	1. Kerja sama tidak memiliki legal standing yang kuat 2. Hambatan dalam akreditasi lembaga & prodi 3. Penurunan kepercayaan mitra eksternal 4. Risiko temuan auditor eksternal	1. Menyusun dan menetapkan SK kebijakan kerja sama 2. Membuat SOP penyusunan dan pengelolaan dokumen kerja sama 3. Melakukan audit dan pembaruan dokumen secara berkala 4. Membentuk unit/penanggung jawab khusus pengelolaan kerja sama	1. Wakil Rektor 1 2. LPBK	1. SK kebijakan kerja sama dan kemitraan 2. SOP kerja sama 3. Daftar MoU/MoA/I A terbaru 4. Notulen rapat koordinasi kerja sama 5. Laporan monitoring & evaluasi kerja sama

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
2.	SOP tentang kerja sama yang dilaksanakan secara efektif dan efisien dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi kepuasan	SOP lengkap (100%) dan dilaksanakan efektif dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerja sama, serta mudah di akses oleh pemangku kepentingan.	Risiko: 1. SOP kerja sama tidak lengkap, tidak sesuai, atau tidak diperbarui 2. SOP tidak dijalankan secara konsisten di seluruh unit 3. Monitoring dan evaluasi kepuasan mitra tidak dilakukan secara berkala 4. SOP sulit diakses pemangku kepentingan Akar Penyebab: 1. Kurangnya koordinasi antar pengelola kerja sama 2. Belum ada sistem informasi terintegrasi untuk publikasi SOP 3. Minimnya pemahaman/pelatihan terkait	1. Kerja sama tidak berjalan efektif dan efisien 2. Kepercayaan dan kepuasan mitra menurun - Risiko temuan audit 3. Terhambatnya pencapaian IKU dan program pengembangan kemitraan	1. Menyusun/meninjau ulang SOP secara berkala dan menyesuaikan regulasi 2. Sosialisasi dan pelatihan implementasi SOP 3. Membuat sistem monev kepuasan mitra dengan instrumen baku 4. Publikasi SOP melalui portal resmi yang mudah diakses	1. Wakil Rektor 1 2. LPBK	1. SK kebijakan kerja sama dan kemitraan 2. SOP kerja sama 3. Daftar MoU/MoA/I A terbaru 4. Notulen rapat koordinasi kerja sama 5. Laporan monitoring & evaluasi kerja sama



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			implementasi SOP 4. Ketiadaan jadwal monev kepuasan yang baku				
3.	Dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerja sama internal Persyarikatan Muhammadiyah termasuk antar UMPP.	Dokumen lengkap tentang kerja sama dengan Persyarikatan Muhammadiyah (majelis, lembaga, PWM/PWA, PDM/PDA, PCM/PCA, PRM/PRA), dan organisasi otonom.	Risiko: 1. Dokumen kebijakan dan prosedur kerja sama internal Persyarikatan tidak lengkap atau tidak diperbarui 2. Pelaksanaan kerja sama tidak sesuai dokumen dan prosedur Akar Penyebab: 1. Kurangnya koordinasi antara UMPP dengan struktur Persyarikatan pada berbagai tingkatan 2. Belum adanya pemetaan kebutuhan dan	1. Kerja sama internal Muhammadiyah tidak berjalan optimal 2. Menurunnya dukungan Persyarikatan terhadap pengembangan UMPP 3. Temuan saat audit mutu dan akreditasi (butir tata kelola/jejaring kerja sama) 4. Hilangnya peluang sinergi program caturdharma dan pendanaan	1. Menyusun dan menetapkan dokumen kebijakan/prosedur kerja sama internal Persyarikatan secara lengkap dan terstruktur 2. Koordinasi berkelanjutan dengan Majelis/Lembaga/PW-PR Muhammadiyah 3. Monitoring berkala pelaksanaan kerja sama internal 4. Penugasan unit khusus dan pelatihan dokumentasi kerja sama	1. Wakil Rektor 1 2. LPBK	1. SK kebijakan dan SOP kerja sama internal Persyarikatan 2. MoU/MoA/I A dengan seluruh tingkatan Persyarikatan Muhammadiyah 3. Database kerja sama internal yang terdokumentasi 4. Laporan monitoring dan evaluasi



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			potensi jejaring Muhammadiyah secara menyeluruh 3. Rendahnya kesadaran unit terhadap kewajiban dokumentasi kerja sama 4. Keterbatasan SDM yang menangani spesifik kerja sama internal Persyarikatan				kerja sama internal 5. Notulen rapat koordinasi dengan Majelis/Lembaga Muhammadiyah
4.	Dokumen formal yang lengkap, rinci dan terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerja sama lembaga formal dalam negeri, termasuk monitoring	100% memiliki dokumen Perjanjian Kerja Sama 100% judul kerja sama relevan program studi yang terdapat di institusi 100% memiliki bukti (laporan, hasil	Risiko: 1. Dokumen kebijakan dan prosedur pengelolaan kerja sama tidak lengkap/ tidak diperbarui 2. Kerja sama tidak relevan dengan prodi 3. Tidak seluruh kerja sama menghasilkan	1. Kerja sama tidak efektif mendukung capaian tridharma 2. Temuan negatif saat audit dan akreditasi 3. Menurunnya kepercayaan mitra eksternal 4. Potensi kerja sama tidak memberikan	1. Penyusunan & pembaruan reguler SOP kerja sama dalam negeri 2. Review relevansi judul kerja sama oleh prodi sebelum penandatanganan 3. Implementasi database kerja sama berbasis sistem informasi (akses publik/intern)	1. Wakil Rektor 1 2. LPBK 3. Ketua Program Studi	1. SOP dan SK kebijakan kerja sama dalam negeri 2. Daftar MoU/MoA/I A lengkap dengan masa berlaku 3. Laporan pelaksanaan dan luaran kerja sama (publikasi,



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
	dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama	kerja sama, luaran) - 100% memiliki jangka waktu yang jelas	luaran yang dapat dibuktikan 4. Tidak ada monitoring kepuasan mitra dan tindak lanjutnya 5. Dokumen tidak mudah diakses oleh pemangku kepentingan Akar Penyebab: 1. Minimnya sistem informasi kerja sama terintegrasi 2. Proses pengendalian kualitas dokumen belum optimal 3. Koordinasi lemah antara unit prodi dan unit kerja sama 4. Belum ada indikator evaluasi hasil kerja sama yang baku	manfaat bagi mahasiswa/prodi 5. Risiko kerja sama kedaluwarsa tanpa perpanjangan	4. Pelaksanaan monev kepuasan mitra secara berkala & tindak lanjutnya 5. Audit internal dokumen kerja sama minimal per tahun		magang, kegiatan tridharma) 4. Instrumen & laporan monev kepuasan mitra 5. Portal/doku mentasi akses publik untuk kebijakan & daftar kerja sama 6. Notulen rapat koordinasi & audit mutu kerja sama



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			5. Kurangnya pemahaman SDM tentang dokumentasi dan monev kepuasan mitra				
5.	Dokumen formal yang lengkap, rinci dan terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerja sama lembaga formal luar negeri, termasuk monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerja sama	100% memiliki dokumen Perjanjian Kerja Sama 100% judul kerja sama relevan program studi yang terdapat di institusi 100% memiliki bukti (laporan, hasil kerja sama, luaran) pelaksanaan kerja sama 100% memiliki jangka waktu yang jelas	Risiko: - Dokumen kebijakan/prosedur kerja sama luar negeri tidak lengkap atau tidak mutakhir - Kerja sama tidak relevan atau tidak memberikan manfaat tridharma - Tidak ada luaran yang dapat dibuktikan dari kerja sama luar negeri - Monitoring dan evaluasi kepuasan mitra tidak dilaksanakan atau tidak terdokumentasi	- Kerja sama internasional tidak optimal mendukung internasionalisasi UMPP - Turunnya tingkat kepercayaan mitra luar negeri - Risiko temuan dalam audit mutu dan akreditasi - Kegiatan <i>joint-research, mobility</i> mahasiswa/dosen tidak berjalan - Penyusutan reputasi institusi secara global	- Penyusunan dan pembaruan SOP kerja sama luar negeri secara reguler - Pemetaan dan validasi relevansi kerja sama oleh prodi sebelum penandatanganan - Sistem monitoring kemajuan, hasil, dan luaran kerja sama - Evaluasi kepuasan mitra luar negeri secara periodik dan tindak lanjutnya - Implementasi e-portal dokumentasi kerja sama yang mudah diakses	- Wakil Rektor 1 - LPBK - Ketua Program Studi	- SOP dan SK kebijakan kerja sama luar negeri - MoU/MoA/I A lengkap dengan masa berlaku & kesesuaian prodi - Laporan pelaksanaan, luaran joint program, publikasi - Instrumen & laporan monev kepuasan mitra internasional - Bukti portal elektronik (akses



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			5. Kesulitan akses informasi kerja sama bagi pemangku kepentingan Akar Penyebab: 1. Proses administrasi kerja sama internasional lebih kompleks (legalisasi, bahasa, regulasi) 2. Koordinasi lemah antara prodi dan unit kerja sama internasional 3. Belum ada standar indikator evaluasi luaran kerja sama luar negeri 4. Keterbatasan kapasitas SDM dalam penanganan kerja sama internasional				publik/internal) 6. Notulen rapat koordinasi & audit pengendalian mutu kerja sama



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			5. Tidak adanya sistem e-database kerja sama yang terpublikasi				
6.	Kepala LPBK memiliki dokumen yang lengkap tentang perencanaan pengembangan jejaring kemitraan yang sah dan terarah yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi institusi.	100% memiliki dokumen perencanaan	Risiko: 1. Dokumen rencana pengembangan kemitraan tidak lengkap atau tidak merujuk visi-misi 2. Dokumen tidak diperbarui mengikuti kebutuhan dan kebijakan terbaru 3. Dokumen tidak digunakan sebagai dasar implementasi jejaring kemitraan Akar Penyebab: 1. Kurangnya koordinasi strategis antara LPBK dengan	1. Pengembangan jejaring kemitraan tidak terarah dan tidak mendukung IKU institusi 2. Risiko tidak terpenuhinya indikator akreditasi (tata kelola kerja sama) 3. Hilangnya peluang kolaborasi yang berdampak pada tridharma dan citra kampus	1. Menyusun dan mengesahkan dokumen perencanaan jejaring kemitraan yang selaras dengan Renstra, visi-misi, dan IKU 2. Review dan update dokumen secara berkala (1 kali/tahun) 3. Sosialisasi dokumen ke seluruh unit relevan untuk implementasi 4. Pelaksanaan monev terhadap capaian rencana kemitraan	1. Wakil Rektor 1 2. LPBK	1. Dokumen perencanaan pengembangan jejaring kemitraan (disahkan dan terdokumentasi) 2. SK penetapan dokumen 3. Notulen rapat penyusunan/perumusan rencana kemitraan 4. Laporan Monev Kegiatan Kerja Sama 5. Bukti publikasi/akses dokumen bagi



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			pimpinan dan prodi 2. Belum adanya mekanisme monitoring & evaluasi perencanaan kemitraan 3. Keterbatasan SDM dalam penyusunan dokumen perencanaan yang berbasis strategi institusi				pemangku kepentingan
7.	Data yang lengkap tentang jumlah, lingkup, relevansi, kemanfaatan kerja sama dan peningkatan kinerja dalam Tri darma bagi pengembangan tri darma serta memberikan kepuasan kepada mitra dan menjamin keberlanjutan yang mencakup kerja sama lokal/wilayah,	100%	Risiko: 1. Data kerja sama tidak lengkap dan tidak terstandar 2. Tidak semua kerja sama dievaluasi relevansi & kemanfaatannya pada Tridharma 3. Tidak ada bukti peningkatan kinerja Tridharma dari kerja sama	1. Kerja sama tidak berkontribusi optimal terhadap kinerja Tridharma 2. Temuan saat audit mutu & akreditasi 3. Hilangnya peluang peningkatan reputasi dan internasionalisasi institusi 4. Menurunnya kepercayaan dan keberlanjutan	1. Membangun database kerja sama terintegrasi untuk semua level kerja sama 2. Menetapkan instrumen evaluasi relevansi & luaran kerja sama (Tridharma) 3. Monitoring & evaluasi kepuasan mitra secara periodik dan terdokumentasi	1. Wakil Rektor 1 2. LPBK 3. Ketua Program Studi	1. Basis data kerja sama lengkap (lokal, nasional, internasional) 2. Laporan capaian luaran kemitraan Tridharma 3. Laporan dan instrumen survei



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
	nasional dan internasional.		4. Kepuasan mitra tidak terukur 5. Data kerja sama tidak mudah diakses untuk kebutuhan audit dan akreditasi Akar Penyebab: 1. Tidak adanya database terpadu/terpusat 2. Koordinasi lemah antara prodi dan unit kerja sama dalam pelaporan 3. Instrumen monev relevansi & kemanfaatan belum baku 4. Tidak ada jadwal evaluasi kepuasan mitra yang rutin 5. SDM administrasi pengelola kerja sama terbatas	hubungan dengan mitra	4. Sosialisasi kewajiban pelaporan kerja sama ke seluruh unit/prodi 5. Audit internal kelengkapan & kualitas data kerja sama		kepuasan mitra 4. MoU/MoA/I A yang relevan & berlaku 5. Notulen rapat evaluasi kemitraan dan tindak lanjut 6. Bukti publikasi data kerja sama / akses portal kerja sama



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
8.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerja sama yang diukur dengan instrumen yang sahih, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan yang berkelanjutan, untuk menjamin ketercapaian VMTS.	100% melaksanakan monev 100% memiliki instrumen yang telah diuji tingkat validitas dan reliabilitas - Minimal 80% mengatakan sangat puas - Pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal memenuhi 6 aspek (sahih, berkala, metodetepat serta bermanfaat, umpan balik ditindaklanjuti, review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan pengguna dan publikasi untuk mudah diakses).	Risiko: - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kemitraan tidak dilakukan secara menyeluruh dan terjadwal - Instrumen pengukuran kepuasan mitra tidak sahih atau tidak digunakan secara konsisten - Tindak lanjut perbaikan tidak terdokumentasi atau tidak dijalankan) - Instrumen kepuasan mitra tidak diuji validitas & reliabilitas - Tingkat kepuasan < 80% karena ketidaksesuaian layanan dengan harapan pengguna	- Efektivitas program kemitraan tidak dapat diukur → meningkatkan mutu - Kepercayaan mitra menurun dan kerja sama berpotensi tidak berkelanjutan - Risiko temuan negatif pada audit mutu & akreditasi - Hilangnya peluang penguatan Tridharma dan IKU - Kepuasan stakeholder rendah → VMTS sulit dicapai - Kepercayaan publik menurun, berdampak pada reputasi institusi	- Menetapkan SOP monev kemitraan yang berlaku untuk seluruh level kerja sama - Mengembangkan dan menerapkan instrumen survei kepuasan yang sahih dan terstandardisasi - Melaksanakan monev kemitraan minimal 1 kali/tahun dan terdokumentasi - Menyusun laporan tindak lanjut perbaikan dan pemantauan keberlanjutan - Optimalisasi sistem informasi untuk rekap dan akses hasil monev - Pengembangan instrumen survei yang sahih & reliabel melalui uji expert dan statistik	- Wakil Rekor 1 - LPBK - Ketua Program Studi	- SOP monitoring & evaluasi kemitraan - Instrumen dan laporan survei kepuasan mitra disertai bukti validitas dan realibilitas, dengan capaian $\geq 80\%$ sangat puas. - Laporan Monev Kegiatan Kerja Sama - Notulen rapat evaluasi & follow up - Database hasil monev yang terdigitalisas i dan mudah diakses



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			6. Hasil survei tidak ditindaklanjuti → tidak ada peningkatan layanan 7. Pengukuran kepuasan tidak berkala & tidak memenuhi 6 aspek standar mutu 8. Hasil survei tidak dipublikasikan sehingga tidak transparan Akar Penyebab: 1. Tidak ada sistem monev kemitraan yang baku di seluruh unit 2. Belum tersedia instrumen evaluasi kepuasan yang tervalidasi 3. Rendahnya kesadaran unit dalam	7. Risiko temuan akreditasi & audit mutu 8. Tidak adanya perbaikan layanan secara berkelanjutan (continuous improvement tidak tercapai)	7. Penetapan jadwal pengukuran kepuasan minimal 1 kali/tahun pada seluruh pemangku kepentingan internal & eksternal 8. Analisis hasil survei dan pelaksanaan tindak lanjut yang terdokumentasi 9. Review tahunan terhadap proses monev dan instrumen survei 10. Publikasi hasil survei dan perbaikan mutu pada media resmi (website/portal)		6. Publikasi hasil survei pada portal informasi 7. Notulen rapat evaluasi & review instrumen



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			melaporkan hasil dan tindak lanjut 4. Koordinasi terbatas antara prodi dan unit kerja sama dalam pengelolaan monev 5. Tidak ada standar pengukuran kepuasan stakeholder berbasis indikator mutu 6. Koordinasi lemah antar unit penyedia layanan 7. Minimnya SDM yang ahli dalam analisis survei & validasi instrumen 8. Tidak adanya jadwal monev yang terstruktur 9. Sistem informasi publikasi belum optimal.				
9	Bukti yang sah tentang kerja sama	100%	Risiko:	1. Tidak tampak kontribusi nyata	1. Penetapan instrumen analisis	1. Wakil Rektor 1	1. Bukti sah pelaksanaan



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
	Caturdarma yang dilengkapi dengan hasil analisis data terkait manfaat kerja sama bagi UMPP, peningkatan kinerja serta memberikan kepuasan kepada mitra dan menjamin keberlanjutan yang mencakup kerja sama lokal/wilayah, nasional, dan internasional.		1. Bukti pelaksanaan kerja sama caturdarma tidak lengkap atau tidak sah 2. Tidak semua kerja sama dievaluasi manfaatnya bagi peningkatan kinerja institusi 3. Kepuasan mitra tidak diukur → keberlanjutan kerja sama tidak terjamin 4. Tidak ada analisis kontribusi kerja sama terhadap Caturdarma Akar Permasalahan: 1. Belum ada instrumen baku analisis manfaat kerja sama	1. kerja sama terhadap IKU dan pengembangan institusi 2. Mitra merasa tidak mendapat manfaat → potensi tidak diperpanjang 3. Reputasi dan kredibilitas UMPP menurun 4. Temuan saat audit mutu dan akreditasi pada aspek tata kelola kemitraan	1. manfaat kerja sama pada Caturdarma 2. Database & pelaporan bukti kerja sama yang terdigitalisasi dan terpusat 3. Monev kepuasan mitra dilakukan minimal 1 kali/tahun 4. Audit mutu internal berkala pada luaran dan keberlanjutan kerja sama 5. Pendampingan unit/prodi dalam dokumentasi dan pelaporan kemitraan	2. LPBK 3. Ketua Program Studi	1. kerja sama (MoU/MoA/IA, dokumentasi kegiatan) 2. Laporan luaran & kontribusi pada Caturdarma (penelitian, pengabdian, pendidikan, Al-Islam & Kemuhimmadiyah) 3. Laporan Monev Kegiatan Kerja Sama 4. Survei & laporan kepuasan mitra + tindak lanjut 5. Daftar kerja sama aktif & keberlanjutan



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			terhadap Caturdarma 2. Pelaporan luaran kerja sama tidak terintegrasi dari setiap unit 3. SDM terbatas dalam dokumentasi dan analisis hasil kerja sama 4. Kurangnya koordinasi prodi-unit kerja sama dalam evaluasi dan pelaporan				(renewal/extension) 6. Notulen rapat monev kemitraan
10.	Kerja sama bidang Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) mencakup kerja sama dalam bidang pendidikan dan pengajaran AIK, penelitian AIK, dan pengabdian kepada masyarakat AIK.	a. Bidang pendidikan dan pengajaran AIK 100% b. Bidang penelitian AIK 10% Bidang Pengabdian kepada masyarakat 10%	Risiko: 1. Kerja sama AIK tidak mencapai target pada aspek penelitian dan PkM 2. Kerja sama AIK tidak menghasilkan luaran nyata dan terdokumentasi 3. Tidak ada pelaporan kontribusi kerja	1. Penguatan AIK sebagai kekhasan institusi tidak optimal 2. Indikator capaian tridarma berbasis AIK rendah 3. Reputasi institusi sebagai PTM berkurang	1. Penguatan kemitraan dengan Persyarikatan Muhammadiyah, ORTOM, AUM, dan PTM untuk penelitian & PkM AIK 2. Integrasi AIK dalam proposal riset/PKM dosen dan mahasiswa 3. Pembuatan instrumen monev	1. LPBK 2. Biro AIK 3. LPPM 4. Ketua Program Studi 5. Lembaga Penjaminan Mutu	1. Dokumen MoU/MoA kerja sama AIK 2. Laporan pelaksanaan kerja sama AIK pada pendidikan, penelitian & pengabdian 3. Luaran: publikasi, produk



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			sama terhadap penguatan AIK di institusi 4. Kurangnya kemitraan AIK di level nasional Akar Permasalahan: 1. Fokus kerja sama lebih banyak pada pendidikan dibanding penelitian & PkM 2. Minimnya mitra strategis dalam pengembangan riset AIK 3. Kurang terintegrasinya AIK dalam roadmap penelitian & pengabdian institusi 4. Belum ada sistem monev khusus luaran kerja sama AIK		luaran kerja sama AIK (output & manfaat) 4. Program kerja sama internasional terkait <i>Islamic studies</i>.		dakwah, modul AIK, program penguatan masyarakat 4. Notulen rapat koordinasi kerja sama AIK dan tindak lanjutnya



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
11.	Kerja sama bidang pendidikan dan pengajaran mencakup pengembangan sumber daya bidang pengembangan akademik; seperti kegiatan ilmiah, pengembangan kurikulum, studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen/dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pengadaan/pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran, pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran.	a. Pengembangan kurikulum 30% b. Studi lanjut dosen 50% c. Peningkatan kemampuan tendik 50% d. Pertukaran dosen/dosen tamu 20% pertahun e. Pertukaran mahasiswa 1% pertahun f. Pengadaan/pemanfaatan fasilitas: sesuaidengan kebutuhan program studi g. Pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran: sesuaidengan kebutuhan prodi	Risiko: 1. Kerja sama tidak menghasilkan output nyata sesuai target 2. Minimnya partisipasi dosen/tendik dalam studi lanjut dan pertukaran 3. Sarpras pembelajaran tidak berkembang sesuai kebutuhan prodi 4. Kerja sama hanya bersifat administratif/sere monial 5. Ketersediaan mitra yang relevan terbatas Akar Permasalahan: 1. Anggaran pengembangan SDM terbatas	1. Kompetensi dosen/tendik tidak meningkat secara optimal 2. Inovasi kurikulum dan pembelajaran terhambat 3. Reputasi akademik kampus stagnan 4. Indikator Tri Dharma tidak tercapai	1. Penyusunan rencana strategis pengembangan SDM berbasis kerja sama 2. Penetapan prioritas studi lanjut dosen sesuai kebutuhan prodi & akreditasi 3. Penguatan kerja sama dengan PTM/PTA, industri, instansi, perusahaan, Pemda, dan OPD dengan output jelas 5. Monitoring capaian kerja sama setiap tahun dengan pelaporan luaran	1. Wakil Rektor 1 2. LPBK 3. LPPM 4. BAUK 5. Fakultas/Program Studi	1. MoU/MoA/I A bidang pendidikan & pengajaran 2. Laporan pertukaran dosen & mahasiswa 3. Bukti pengembangan kurikulum berbasis kerja sama 4. Daftar pengadaan/pemanfaatan fasilitas hasil kerja sama 5. Notulen rapat & evaluasi luaran kerja sama



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			2. Kurangnya roadmap kerja sama berbasis kebutuhan prodi 3. Keterbatasan kemampuan bahasa/kompetensi untuk pertukaran internasional 4. Proses perencanaan kerja sama tidak terintegrasi dengan Renstra institusi 5. Kurangnya promosi kerja sama ke sivitas akademika				
12.	Kerja sama bidang penelitian mencakup pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat, seperti	a. Pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat 10% dari jumlah penelitian	Risiko: 1. Kegiatan riset kolaboratif rendah dan tidak mencapai target 2. Minimnya proposal kerja sama yang disetujui mitra	1. Pengembangan keilmuan dosen stagnan 2. Dampak riset bagi masyarakat dan institusi rendah 3. Reputasi akademik & jejaring kerja sama stagnan	1. Kemitraan strategis dengan PTMA, industri, Pemda, instansi, dan mitra luar negeri 2. Monitoring dan evaluasi capaian riset kerja sama setiap tahun	1. LPBK 2. LPPM 3. Fakultas/Program Studi	1. MoU/MoA/ITridarma PT 2. Dokumen sharing dana penelitian (kontrak, laporan penggunaan)



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
	<i>sharing</i> penelitian, <i>sharing</i> dana penelitian, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama.	b. Penelitian bersama 10% dari jumlah penelitian c. <i>Sharing</i> dana penelitian 50% dari total dana/judul penelitian Publikasi ilmiah bersama 30% dari jumlah publikasi	3. <i>Sharing</i> pendanaan tidak terpenuhi sehingga proyek tidak berjalan optimal 4. Jumlah publikasi hasil kerja sama tidak sesuai standar kinerja 5. Hasil riset tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Akar Permasalahan: 1. Keterbatasan jejaring dan mitra riset strategis 2. - Kapasitas peneliti dalam manajemen riset internasional/nasional belum memadai 3. Motivasi dosen untuk kolaborasi masih rendah dibanding				3. Laporan kegiatan seminar/kajian ilmiah bersama



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			penelitian individu 4. Belum terintegrasi dengan roadmap penelitian institusi & prodi 5. Kurangnya insentif untuk riset kolaboratif dan publikasi bersama				
13.	Kerja sama bidang pengabdian kepada masyarakat mencakup implementasi keilmuan yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat seperti <i>sharing</i> kegiatan pengabdian kepada masyarakat, <i>sharing</i> dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama, publikasi	a. Pengabdian kepada masyarakat yang mencakup implementasi keilmuan 10% dari jumlah kegiatan. b. <i>Sharing</i> dana pengabdian kepada masyarakat 50% perkegiatan c. Publikasi ilmiah 30% dari jumlah publikasi ilmiah	Risiko: 1. Minimnya kegiatan PkM kolaboratif yang relevan dengan keilmuan prodi 2. Kegiatan tidak berdampak nyata pada masyarakat/mitra 3. <i>Sharing</i> pendanaan tidak memenuhi target sehingga aktivitas terbatas 4. Publikasi ilmiah hasil PkM tidak mencapai standar	1. Dampak sosial dan keberlanjutan program PkM rendah 2. Reputasi institusi dan peran UMPP bagi masyarakat kurang terlihat 3. Penilaian akreditasi pada aspek tridarma turun 4. Ketercapaian IKU & indikator renstra PkM tidak optimal	Penguatan kemitraan strategis dengan pemerintah daerah, industri, rumah sakit, sekolah & PTMA lainnya	1. LPPM 2. LPBK 3. Fakultas/ Program Studi	1. MoU/MoA/I A tridarma PT 2. Laporan pelaksanaan dan luaran PkM kolaboratif 3. Berita acara dan notulen koordinasi kerja sama PkM



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
	dan pemanfaatan produk bersama-sama.	Pemanfaatan produk bersama-sama: 100% dari produk	5. Produk PkM tidak termanfaatkan secara berkelanjutan Akar Penyebab 1. Keterbatasan jejaring dan mitra yang siap bekerja sama dalam PkM 2. - Inovasi dan hilirisasi hasil PkM belum maksimal 3. Motivasi dosen untuk publikasi PkM masih rendah dibanding penelitian 4. Belum adanya sistem pendampingan/in kubasi keberlanjutan produk PkM 5. Kurangnya integrasi PkM dengan kebutuhan				



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			masyarakat berbasis data				
14.	Persentase program studi S1 dan D3 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	≥70%	Risiko: 1. Tidak semua Prodi memiliki kerja sama yang aktif dan relevan dengan keilmuan 2. Kerja sama hanya bersifat administratif (MoU/MoA) tanpa pelaksanaan nyata 3. Pelaksanaan kerja sama tidak memenuhi indikator luaran Tridarma 4. Prodi kekurangan mitra strategis Akar permasalahan: 1. Minimnya inisiatif Prodi mencari mitra kerja sama	1. Reputasi dan relevansi lulusan terhadap dunia kerja berkurang 2. Pelaksanaan Tridarma tidak berkembang optimal 3. Hilangnya peluang peningkatan kompetensi dosen/mahasiswa melalui jejaring	1. Monev pelaksanaan kerja sama minimal 1 kali/tahun dengan pelaporan luaran 2. Kemitraan berkelanjutan dengan industri, pemerintah, PTMA, dan mitra	1. Wakil Rektor 1 2. LPBK 3. Fakultas/Program Studi	1. MoU/MoA/I A aktif di setiap Prodi 2. Laporan kegiatan kerja sama mendukung Tridarma 3. Bahan monev dan survei kepuasan mitra 4. Daftar mitra & rekapan capaian % kerja sama tiap Prodi



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			2. Kurangnya pemetaan kebutuhan dan peluang kerja sama berbasis kurikulum 3. Koordinasi kelembagaan kerja sama belum optimal 4. Ketergantungan pada kerja sama yang diinisiasi LPBK saj				

b. Indikator Kinerja Tambahan

No	Indikator Kinerja Tambahan	Indikator & Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
1.	Asas kerja sama UMPP	100% asas kerja sama UMPP harus memenuhi asas manfaat dan saling meningkatkan kinerja.	Risiko: 1. Kerja sama tidak memberikan manfaat nyata bagi UMPP maupun mitra 2. Ketidakseimbangan manfaat (salah satu pihak lebih diuntungkan) 3. Kerja sama hanya bersifat formal	1. Capaian indikator kerja sama & Tri Dharma tidak optimal 2. Pemborosan sumber daya & waktu (inefisiensi) 3. Penurunan reputasi institusi/prodi	1. Penetapan kebijakan asas kerja sama berbasis manfaat & kinerja 2. Formulasi indikator manfaat dalam setiap dokumen kerja sama (<i>output & outcome</i>) 3. Evaluasi periodik luaran kerja sama dan tindak lanjut	1. Wakil Rektor 1 2. LPBK 3. Fakultas/Program Studi	1. Kebijakan/asas kerja sama UMPP (SK/Manual SPMI) 2. MoU/MoA/I A yang memuat indikator manfaat & peningkatan kinerja



No	Indikator Kinerja Tambahan	Indikator & Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			tanpa luaran kinerja 4. Kegiatan tidak berkontribusi terhadap Tridarma UMPP Akar Permasalahan: 1. Penilaian awal terhadap potensi manfaat kerja sama tidak dilakukan secara menyeluruh 2. Parameter manfaat & kinerja tidak dimasukkan dalam MoU/MoA 3. Pemantauan hasil kerja sama tidak berjalan konsisten 4. Terbatasnya literasi unit terhadap prinsip asas kerja sama	4. Keberlanjutan kerja sama dengan mitra menurun	4. Terminasi kerja sama yang tidak memberikan manfaat 5. Edukasi kepada unit pelaksana mengenai asas manfaat & <i>mutual improvement</i>		3. Laporan Evaluasi Kegiatan Kerja Sama 4. Bukti luaran kerja sama yang meningkatkan kinerja institusi/mitra 5. Notulen rapat koordinasi & tindak lanjut peningkatan manfaat kerja sama
2.	Syarat kerja sama, pihak mitra tidak melakukan penetrasi	- 100% penetrasi ideologi	Risiko: 1. Terjadinya penetrasi ideologi	1. Pelanggaran prinsip & jati diri	1. Penyusunan SOP mitra	1. Wakil Rektor 1 2. LPBK	1. SOP & SK pemenuhan



No	Indikator Kinerja Tambahan	Indikator & Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
	ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara maupun Persyarikatan Muhammadiyah, tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan, bertujuan untuk meningkatkan kinerja semua pihak, lembaga resmi bukan partai politik atau afiliasi partai politik tertentu.	sesuai dengan paham Muhammadiy ahdan ideologi negara. - 100% pihak mitratidak bermasalah dengan hukum - 100% lembaga mitra bukan partai politik atau afiliasinya.	yang bertentangan dengan negara & Persyarikatan Muhammadiyah 2. Kerja sama dengan mitra yang sedang bermasalah hukum 3. Kerja sama dengan lembaga politik atau berafiliasi politik 4. Kerja sama dimanfaatkan untuk kepentingan non-akademik Akar Permasalahan: 1. Verifikasi dan <i>legal due diligence</i> terhadap mitra tidak dilakukan secara menyeluruh	Persyarikatan Muhammadiyah 2. Pencorengan reputasi perguruan tinggi 3. Potensi sanksi hukum & risiko gugatan pihak ketiga 4. Penurunan kepercayaan publik	berdasarkan ideologi & legalitas 2. Penerapan instrumen pemeriksaan legalitas mitra (<i>legal check</i> , dokumen resmi) 3. Evaluasi kerja sama secara periodik dan pemutusan kerja sama jika melanggar kriteria	3. Fakultas/ Program Studi	syarat kemitraan 2. Checklist pemeriksaan legalitas & kesesuaian ideologi mitra 3. MoU/MoA/I A yang mencantumkan klausul kepatuhan ideologi & hukum 4. Laporan evaluasi berkala kerja sama



No	Indikator Kinerja Tambahan	Indikator & Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			2. Kurangnya pemahaman unit pelaksana terkait syarat ideologis & hukum dalam kerja sama 3. Tidak adanya instrumen <i>screening</i> reputasi dan status hukum mitra 4. Tekanan untuk mengejar jumlah kerja sama tanpa seleksi mutu mitra				
3.	Tindak lanjut kerja sama Pimpinan UMPP	- 100% ditindak lanjuti oleh pimpinan UMPP dan unit kerja terkait secara berkala dan tersistem.	Risiko: 1. Tidak semua kerja sama ditindaklanjuti setelah MoU/MoA ditandatangani 2. Tindak lanjut tidak sesuai tujuan awal kerja sama 3. Monitoring dan evaluasi tidak	1. Kerja sama menjadi tidak produktif (sekadar dokumen) 2. Turunnya kepercayaan mitra & peluang kolaborasi hilang 3. Merugikan kinerja capaian indikator	1. Pengembangan sistem manajemen kerja sama terintegrasi dengan <i>reminder</i> masa berlaku & <i>progress report</i> . 2. Menetapkan PIC dan target kinerja tindak lanjut setiap kerja sama 3. Rapat koordinasi berkala dan evaluasi	1. WR 1 2. LPBK 3. Dekan/ Wakil Dekan 4. Kepala Program Studi	1. Database kerja sama (Status aktif, progress, MoU/MoA Tracker) 2. Laporan tindak lanjut per tahun 3. Notulen rapat koordinasi



No	Indikator Kinerja Tambahan	Indikator & Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			tersistem dan tidak berkala 4. Kerja sama kedaluwarsa tanpa hasil dan tanpa keputusan resmi Akar permasalahan: 1. Tidak ada sistem yang memantau siklus MoU/MoA (<i>database & reminder</i>) 2. Kurangnya koordinasi antara pimpinan, unit kerja, dan prodi 3. Beban kerja pengelola kerja sama terlalu tinggi 4. Tidak ada indikator kinerja yang jelas per unit 5. Kurang pemahaman manfaat kerja sama bagi	akreditasi dan IKU 4. Menurunnya citra institusi sebagai mitra yang kredibel	kemajuan kerja sama oleh pimpinan 4. Pelaporan progres dan tindak lanjut dilaporkan setiap tahun 5. Penyusunan pedoman tindak lanjut dan terminasi kerja sama		tindak lanjut kerja sama 4. SOP tindak lanjut & terminasi kerja sama 5. Bukti implementasi kegiatan 6. Hasil monitoring & evaluasi dan rekomendasi perbaikan



No	Indikator Kinerja Tambahan	Indikator & Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			pengembangan Tridharma				
4.	Pengakuan kerja sama Pendidikan UMPP	Terdapat bukti sah kerja sama UMPP memiliki pengakuan Program <i>Credit Transfer System</i> .	Risiko: 1. Kerja sama pendidikan belum mendapatkan pengakuan dalam bentuk CTS 2. Kegiatan CTS tidak berlanjut atau tidak terdokumentasi 3. Kurikulum antar institusi tidak ekuivalen sehingga CTS tidak dapat diterapkan 4. Bukti hukum dan akademik pengakuan CTS tidak lengkap/ tidak mutakhir Akar permasalahan: 1. Belum adanya pedoman baku ekuivalensi CPL,	1. Capaian kerja sama tidak berkontribusi nyata terhadap tridharma 2. Mahasiswa kehilangan hak rekognisi SKS dari mitra 3. Menurunnya daya saing dan reputasi institusi dalam kerja sama akademik 4. Nilai indikator kerja sama terpengaruh pada penilaian IKU	1. Menyusun dan menerapkan SOP CTS dan ekuivalensi kurikulum antar institusi 2. Penguatan koordinasi antara Wakil Rektor Akademik, LPBK, dan Prodi 3. Mewajibkan bukti legalitas dan dokumen akademik (<i>CPL mapping & learning agreement</i>) pada setiap perjanjian CTS 4. Menyediakan database digital bukti CTS (MoU/MoA, daftar mahasiswa, hasil rekognisi) 5. Evaluasi berkala implementasi CTS setiap tahun	1. Wakil Rektor 1 2. LPBK 3. Fakultas/ Program Studi	1. MoU/MoA dengan klausul CTS 2. Dokumen ekuivalensi CPL & kurikulum (<i>Curriculum Mapping</i>) 3. <i>Learning Agreement</i> tiap mahasiswa peserta CTS 4. Bukti implementasi CTS



No	Indikator Kinerja Tambahan	Indikator & Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			kurikulum, dan beban studi 2. Koordinasi akademik lintas institusi masih lemah 3. Sistem dokumentasi kerja sama belum terintegrasi dan mudah diakses				
5.	Pengakuan kerja sama Penelitian UMPP	Terdapat bukti sah kerja sama UMPP memiliki pengakuan <i>Joint Research</i> .	Risiko: 1. Kerja sama penelitian tidak memiliki pengakuan formal sebagai <i>Joint Research</i> 2. Pelaksanaan kerja sama hanya berupa wacana/tidak berjalan 3. Tidak adanya luaran penelitian bersama (publikasi, paten, HKI, prototipe)	1. Capaian indikator tidak terpenuhi → menurunkan skor mutu kerja sama 2. Reputasi institusi dalam jejaring riset menurun 3. Hilangnya peluang publikasi bersama dan luaran berdampak bagi masyarakat 4. Tidak berkontribusi pada peningkatan IKU	1. Penyediaan database digital dokumen dan luaran kerja sama riset 2. Monitoring dan evaluasi berkala progres penelitian bersama setiap tahun	1. Wakil Rektor 1 2. LPPM 3. LPBK 4. Program Studi	1. MoU/MoA yang memuat klausul <i>Joint Research</i> 2. Dokumentasi kegiatan riset bersama (foto, berita website)



No	Indikator Kinerja Tambahan	Indikator & Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			4. Dokumentasi kerja sama riset tidak lengkap dan tidak terdigitalisas Akar permasalahan: 1. Belum ada pedoman atau SOP khusus <i>Joint Research</i> 2. Kurangnya inisiasi kolaborasi riset dari dosen dan pusat penelitian 3. Koordinasi antar institusi tidak optimal 4. Minimnya dukungan pendanaan atau skema hibah kolaborasi 5. Tidak adanya pemantauan progres kerja sama riset				



No	Indikator Kinerja Tambahan	Indikator & Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
6.	Pengakuan kerja sama Pengabdian kepada Masyarakat	- Terdapat bukti sah kerja sama UMPP memiliki pengakuan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Risiko: 1. Kerja sama PkM tidak memperoleh pengakuan formal dari mitra 2. Pelaksanaan PkM tidak menunjukkan dampak nyata bagi masyarakat/mitra 3. Bukti hasil PkM kurang lengkap, tidak terdokumentasi, atau tidak terpublikasi 4. Kegiatan hanya bersifat seremonial tanpa keberlanjutan Akar permasalahan: 1. Kurangnya perencanaan PkM bersama mitra (<i>need analysis</i> tidak optimal)	1. Tidak terpenuhinya indikator mutu kerja sama bidang PkM 2. Menurunnya kredibilitas UMPP di mata mitra dan masyarakat 3. Hilangnya peluang keberlanjutan PkM dan pengembangan dampak sosial 4. Skor IKU menurun akibat minimnya luaran kolaboratif	Digitalisasi data kerja sama PkM untuk akses pemangku kepentingan	1. LPPM 2. LPBK 3. Fakultas dan Program Studi	MoU/MoA yang memuat kegiatan PkM bersama



No	Indikator Kinerja Tambahan	Indikator & Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			2. Minim kolaborasi antara LPPM, Prodi, dan mitra dalam penyusunan program 3. Tidak adanya indikator pengukuran manfaat dan kepuasan mitra 4. Sistem dokumentasi dan pelaporan PkM belum terstandar dan terintegrasi				
7.	Instrumen kepuasan mitra yang telah diuji validitas dan reliabilitas	- Terdapat bukti sahih instrumen yang telah diujicobakan.	Risiko: 1. Instrumen tidak valid atau tidak reliabel sehingga hasil survei tidak akurat 2. Tidak ada bukti uji coba instrumen sebelum digunakan secara resmi 3. Instrumen tidak mengukur aspek	1. Keputusan mutu kerja sama menjadi bias dan tidak efektif 2. Kepuasan mitra tidak tercermin secara nyata sehingga memperlemah keberlanjutan kerja sama 3. - Potensi temuan dalam audit mutu internal maupun	1. Melakukan uji validitas & reliabilitas secara statistik pada setiap pengembangan instrumen 2. Review konten instrumen oleh ahli metodologi & pengguna (stakeholder) 3. Penggunaan database terpusat	1. LPBK 2. LPM 3. LPPM 4. Program Studi	1. Naskah instrumen survei kepuasan mitra 2. Hasil uji validitas & reliabilitas (output software statistik) 3. Laporan survei kepuasan



No	Indikator Kinerja Tambahan	Indikator & Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			relevan kepuasan mitra kerja sama 4. Data survei tidak dapat dijadikan dasar perbaikan mutu karena kualitas instrumen rendah Akar permasalahan: 1. Tidak ada pedoman baku penyusunan dan pengujian instrumen survei 2. Keterbatasan SDM dalam metodologi survei dan statistik uji validitas & reliabilitas 3. Koordinasi antar unit kerja sama dan SPMI kurang optimal 4. Tidak tersedia database hasil uji instrumen dan	akreditasi eksternal 4. - Reputasi dan kepercayaan mitra dapat menurun	untuk seluruh instrumen survei		mitra dan tindak lanjut perbaikan



No	Indikator Kinerja Tambahan	Indikator & Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			jejak dokumen validasi				
8.	Kepuasan pihak mitra kerja sama UMPP	80 % sangat puas Kemitraan yang berkelanjutan.	Risiko: 1. Tingkat kepuasan mitra < 80% 2. Kerja sama tidak berkelanjutan karena mitra merasa tidak mendapatkan manfaat optimal 3. Instrumen pengukuran tidak akurat sehingga hasil survei tidak mencerminkan kondisi nyata 4. Tindak lanjut hasil survei tidak dilakukan sehingga mutu tidak meningkat Akar permasalahan: 1. Program kerja sama tidak relevan dengan kebutuhan mitra	1. Pemutusan kerja sama atau tidak adanya kerja sama berkelanjutan 2. Penurunan kepercayaan mitra terhadap UMPP 3. Capaian indikator kinerja kerja sama dan Tri Dharma menurun 4. Reputasi institusi terdampak negatif	1. Menerapkan survei kepuasan berkala menggunakan instrumen valid & reliabel 2. Menyusun <i>Service Level Agreement</i> (SLA) untuk menjaga kualitas pelayanan kerja sama 3. Evaluasi & tindak lanjut keluhan/masukan mitra secara sistematis 4. Optimalisasi komunikasi dengan mitra melalui PIC yang ditetapkan 5. Review program kerja sama tiap tahun untuk memastikan keberlanjutannya	1. LPBK 2. LPM 3. LPPM	1. Hasil survei kepuasan mitra & rekap penilaian >80% sangat puas 2. Instrumen survei + bukti validitas & reliabilitas 3. Bukti keberlanjutan kerja sama (MoU/MoA yang diperpanjang, program lanjutan)



No	Indikator Kinerja Tambahan	Indikator & Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			2. Komunikasi dan koordinasi antar pihak lemah 3. Pelaksanaan kerja sama tidak sesuai perjanjian/ekspektasi 4. Belum ada mekanisme baku untuk menindaklanjuti hasil survei kepuasan				



6. Pihak yang terlibat

- a. Rektor UMPP
- b. Kepala LPBK UMPP
- c. Kepala LPM UMPP
- d. Dekan dan Ketua Program Studi, Kepala Biro dan Kepala Bidang di lingkungan UMPP

7. Dokumen yang terkait

1. Statuta UMPP
2. Rencana Induk Pengembangan UMPP
3. Rencana Strategis UMPP
4. Rencana Strategis LPBK

8. Referensi

- a. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d. Permendikbud No. 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Permentistekdikti No 50 Tahun 2018 Perubahan atas Pemenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- i. Pedoman SPMI 4.0 PTMA 2019, Majelis Diktilitbang, Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- j. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- k. Matriks penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Swasta tahun 2018.
- l. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 tahun 2025
- m. Indikator Kinerja Utama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Berdampak Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Tinggi Tahun 2025





**Universitas Muhammadiyah
Pekajangan Pekalongan**